

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah harus terus berupaya dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan untuk mencapai tata kelola yang baik, transparansi dan akuntabilitas merupakan suatu keharusan dalam proses pelayanan menurut KPK (dalam Saputra, 2018). Pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan merupakan fondasi penting dalam administrasi pemerintahan, termasuk pada organisasi perangkat daerah (OPD) di Kabupaten Pesisir Selatan. Kabupaten Pesisir Selatan telah meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak sepuluh kali berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Predikat tersebut menunjukkan bahwa laporan keuangan Kabupaten Pesisir Selatan dianggap telah memenuhi standar akuntansi yang berlaku. Namun, meskipun meraih predikat tersebut, tetap saja terdapat temuan dari BPK yang menandakan adanya kelemahan dalam pengelolaan keuangan di beberapa aspek, berikut ini merupakan hasil terkait dengan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap hukum yaitu:

1. Pemungutan pendapatan Pajak Hotel, Restoran dan BPHTB belum tertib.
2. Pembayaran honorarium pada dua SKPD tidak sesuai ketentuan sebesar Rp. 266.314.500,00.
3. Belanja BBM pada tiga SKPD tidak sesuai ketentuan sebesar Rp. 322.895.965,00.

4. Data kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dibayarkan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan sebesar Rp. 15.411.400,00.
5. Belanja suku cadang Dinas Perkimtan LH tidak sesuai dengan kondisi senyatanya sebesar Rp. 102.362.794,00.
6. Realisasi belanja pemeliharaan gedung kantor dan pemeliharaan jalan dan jembatan secara swakelola pada Dinas PUPR tidak sesuai kondisi senyatanya sebesar Rp. 305.467.769,50.
7. Belanja perjalanan dinas pada Sekretariat DPRD tidak sesuai ketentuan sebesar Rp. 159.800.800,00. dan membebani keuangan daerah sebesar Rp. 355.227.133,33.
8. Penerimaan hibah tidak tercantum dalam APBD dan realisasi belanja hibah belum dipertanggungjawabkan oleh penerima sebesar Rp. 905.000.000,00.
9. Ketidaksesuaian mutu dan kekurangan volume pekerjaan atas 15 paket pekerjaan pada tiga SKPD sebesar Rp. 949.563.618,46.
10. Pengelolaan kas Bantuan Operasional Sekolah tidak sesuai ketentuan.

Oleh karena itu, dari hal tersebut menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana praktik akuntansi pemerintahan di Kabupaten Pesisir Selatan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Dinas Kesehatan dipilih sebagai objek penelitian karena memiliki peran penting dalam pelayanan publik dan pengelolaan anggaran yang signifikan (Kementerian Kesehatan, 2020).

Standar akuntansi pemerintah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, menyediakan kerangka kerja bagi penyusunan laporan keuangan yang andal dan dapat dibandingkan serta ditetapkan sebagai acuan untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan pada pemerintah daerah. Peraturan ini memiliki tujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Kementerian Keuangan, 2010). Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 digantikan oleh PP Nomor 71 Tahun 2010, yang mengubah sistem akuntansi yang digunakan oleh Dinas Kesehatan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Selain itu, Dinas Kesehatan juga harus mematuhi peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara, seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Namun, implementasi peraturan ini sering kali menghadapi berbagai tantangan di tingkat daerah. Oleh karena itu, Dinas Kesehatan Pesisir Selatan harus memastikan bahwa seluruh transaksi keuangan dicatat secara akurat dan dilaporkan secara tepat waktu.

Proses penyusunan laporan keuangan di Dinas Kesehatan melibatkan beberapa tahapan penting, mulai dari pencatatan transaksi harian, penjurnalan, pemosting ke buku besar, hingga penyusunan laporan keuangan interim dan tahunan. Setiap tahapan ini memerlukan ketelitian dan kepatuhan terhadap prosedur yang telah ditetapkan untuk menghindari

kesalahan dan memastikan keakuratan data keuangan, pernyataan Yeni (dalam Isabella, 2023) pemahaman akuntansi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, Oleh karena itu, laporan keuangan harus dibuat dengan tepat, cermat, dan sepenuhnya diberikan pertanggungjawaban kepada yang paling kompeten di bidang tersebut sesuai dengan pernyataan Ardianto dan Eforis (dalam Isabella, 2023) bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penggunaan teknologi informasi dalam sistem akuntansi pemerintah juga memainkan peran penting dalam meningkatkan efisiensi dan akurasi proses pelaporan keuangan (Herawati & Mujiati, 2021). Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) adalah sistem akuntansi yang digunakan oleh Dinas Kesehatan untuk mencatat transaksi. SIPKD adalah aplikasi terpadu yang berfungsi sebagai alat bantu pemerintah daerah untuk meningkatkan pelaksanaan berbagai peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah. Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Operasional, dan CaLK adalah semua laporan keuangan yang dibuat oleh Dinas Kesehatan.

Penyajian laporan keuangan yang tepat waktu dan sesuai standar memberikan berbagai manfaat, antara lain membantu manajemen dalam pengambilan keputusan yang tepat, meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana kesehatan, serta memenuhi kewajiban pertanggungjawaban kepada pihak legislatif dan instansi pengawas (Pratama & Pratama, 2020). Laporan keuangan yang disusun dengan baik

juga menjadi alat evaluasi kinerja keuangan Dinas Kesehatan, yang dapat digunakan untuk merumuskan kebijakan dan strategi peningkatan layanan kesehatan di masa depan. Namun, dalam praktiknya, penyusunan dan penyajian laporan keuangan di Dinas Kesehatan seringkali menghadapi berbagai tantangan. Tantangan ini meliputi keterlambatan dalam menyajikan laporan keuangan, keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi akuntansi pemerintahan, keterbatasan sistem informasi yang belum terintegrasi dengan baik, serta kendala dalam mengumpulkan data keuangan dari berbagai unit kerja di bawah Dinas Kesehatan. Oleh karena itu, upaya peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia, serta pengembangan dan penerapan sistem informasi akuntansi yang terintegrasi, menjadi sangat penting untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut (Simanjuntak, 2022).

Beberapa penelitian telah dilakukan terkait penyusunan dan penyajian laporan keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah seperti penelitian Nadhratul Marhamah (2022) dengan judul Mekanisme Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kantor Perwakilan Sumatera Barat, bahwa Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi finansial perusahaan secara keseluruhan dapat diidentifikasi melalui laporan keuangan. Laporan harus dibuat dengan tepat, cermat, dan sepenuhnya dipertanggungjawabkan kepada orang yang berkompeten di bidangnya, seperti seorang akuntan, mengingat pentingnya hal itu. Laporan keuangan yang dilakukan pada akhir tahun anggaran oleh setiap instansi pemerintah adalah salah satu mekanisme pertanggungjawaban

pemerintah kepada rakyat untuk memenuhi syarat transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah. Adapun penelitian Yuyun Yuniarsih (2019) dengan judul Mekanisme Pelaporan Keuangan di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKAD) Kabupaten Subang, bahwa hasil penelitian menunjukkan Pelaporan keuangan yang dibuat oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Subang didasarkan pada undang-undang yang ditetapkan oleh Bupati Subang, salah satunya adalah Peraturan Nomor 37 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Subang. Penulis menemukan bahwa Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) ini memiliki masalah dengan pelaporan keuangannya, yang sering tertunda. Dengan demikian, proses laporan keuangan menjadi lebih lamban, yang jelas berdampak negatif pada Kantor Dinas tersebut. Adapun penelitian lainnya oleh Muh. Ridwan (2017) dengan judul Mekanisme Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Pada UMKM Di Kabupaten Pinrang, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa UKM Inti Foto belum menerapkan SAK ETAP, laporan-laporan yang disajikan oleh UKM Inti Foto hanya berupa pencatatan yang menurut sepemahamannya saja yaitu untuk mengetahui Laba/omset saja, jelas kurang sesuai karena dalam prosedural pelaporan keuangan yang berdasarkan SAK ETAP yaitu Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Laporan Arus Kas, Catatan Atas Laporan Keuangan. Maka dari itu penulis melakukan implementasi

laporan keuangan sesuai dengan SAK ETAP agar UKM Inti Foto dapat menerapkannya.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan di Dinas Kesehatan Pesisir Selatan serta mengidentifikasi kesesuaian praktik tersebut dengan PP No. 71 Tahun 2010. Secara keseluruhan, mekanisme penyusunan dan penyajian laporan keuangan di Dinas Kesehatan adalah proses yang kompleks namun sangat penting untuk memastikan akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan publik. Dengan mengikuti standar dan prosedur yang telah ditetapkan, serta terus melakukan perbaikan dan penyesuaian terhadap perkembangan teknologi dan regulasi, Dinas Kesehatan dapat menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang andal dan bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Berdasar pada uraian di atas penulis tertarik untuk membahas bagaimana mekanisme penyusunan laporan keuangan pada salah satu OPD di Kabupaten Pesisir Selatan yaitu pada Dinas Kesehatan dan penulis mengangkat judul **“Mekanisme Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Pesisir Selatan (Studi Kasus pada Dinas Kesehatan Pesisir Selatan)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, saya merumuskan masalah yaitu **“Bagaimana Mekanisme Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Pesisir Selatan (Studi Kasus pada Dinas Kesehatan Pesisir Selatan)”**.

1.3 Tujuan

Untuk mengetahui “Bagaimana Mekanisme Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Pesisir Selatan (Studi Kasus pada Dinas Kesehatan Pesisir Selatan)”.

1.4 Manfaat

Penelitian yang akan dilaksanakan diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana aplikasi teori ilmu pengetahuan yang diperoleh terkait akuntansi pemerintah dan juga sebagai sarana proses pembelajaran bagi peneliti sendiri.

2. Bagi pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan terhadap pengembangan ilmu akuntansi serta referensi bagi peneliti selanjutnya.

3. Bagi pihak lain

Bagi pembaca atau pihak yang berkepentingan, diharapkan dari hasil penelitian yang sangat terbatas ini dapat memberikan manfaat dalam menambah pengetahuan dan dijadikan bahan masukan serta acuan untuk melakukan penelitian lebih lanjut.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini disusun secara sistematis terdiri dari 5 bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan penjelasan tentang latar belakang masalah,

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini berisikan penjelasan tentang konsep dan teori yang mendasari penelitian serta penelitian terdahulu.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan penjelasan tentang metode penelitian yaitu jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan penjelasan tentang deskripsi objek penelitian, hasil analisis data dan pembahasan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisikan penjelasan tentang kesimpulan dari hasil analisis data serta pembahasannya, dan saran yang diberikan oleh peneliti.

